

Itikad tidak baik para pihak dalam suatu transaksi jual beli tanah yang dilakukan untuk menghindari upaya hukum pihak lawan : studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 42/Pdt.Plw/2013/PN.Mdn = Forfeiture counterfeit of the parties in land transaction which have been done to avoiding legal action remedy by opposing party : study case of the Medan Court Verdict No. 42/Pdt.Plw/2013/PN.Mdn

Temmy Angkawijaya Putra, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20364965&lokasi=lokal>

Abstrak

Tesis ini membahas bahwa suatu perbuatan hukum jual beli tidak dapat dilihat dari sisi formilnya saja namun latar belakang atau unsur-unsur atau itikad para pihak dalam transaksi jual beli tersebut wajib menjadi bahan pertimbangan apakah transaksi jual beli tersebut memang murni transaksi jual beli atau hanya suatu perjanjian pura-pura yang bertujuan hanya untuk menghindari para pihak dari suatu hukuman atau dari upaya hukum pihak lain, yang hal tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum Hasil penelitian menyarankan bahwa agar salah satu syarat dikabulkannya permohonan perubahan data atau perubahan nama pemegang hak pada sertifikat atas suatu tanah dapat terlebih dahulu dilakukan pengumuman atas transaksi jual beli atau pengalihan tersebut pada surt kabar atau pada instansi daerah setempat, hal mana bertujuan untuk lebih menjaga serta melindungi kepentingan atau kedudukan pihak ketiga.

.....This thesis discuss that a legal action of sales and purchase transaction cannot be overviewed just by formal side but also should be overviewed from its background or other elements or the will of parties in sales and purchase transaction must be to be consider if those kind of sales and purchase transaction are pure sales and purchase transaction or dissembler agreement with aim to avoiding punishment or legal remedy that occur from the opposite party, those kind of transaction can be categorized as forfeiture/counterfeit. This research suggest that one of the terms/requirement so the solicitation of data or the party right entitled to land act can be granted by making announcement of those kind of transaction or those kind if diversionary in newspaper or local authority, which those action are needed with it aims is to protect the interest of the third parties.